



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.164-Huk/2025

TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025-2027

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Pusat dan daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Pusat dan Daerah dalam rangka stabilisasi inflasi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan peran digitalisasi UMKM, mengarahkan perlu adanya sinergits program kegiatan pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580.05/Kep.1071-Prodi/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 4. Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Nomor 500.2.4.3/74/EK tanggal 22 April 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan panduan bagi setiap Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karawang dalam Pengendalian Inflasi periode Tahun 2025-2027.

- KETIGA : Pencapaian target Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU agar dilaporkan oleh setiap Perangkat Daerah/Instansi terkait Tingkat Daerah Kabupaten Karawang setiap Triwulan Kepada Bupati Karawang melalui Sekertaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang; dan
 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **16 Mei 2025**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.164-Huk/2025
TANGGAL : 16 Mei 2025

PROGRAM KERJA PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025-2027

STRATECI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TIMELINE TARGET			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB
				2025	2026	2027	
Stabilisasi Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Operasi Pasar Murah Kepokmas APBD Kab. Karawang di 160 Lokasi - Operasi Pasar Murah Kepokmas APBD Provinsi di 2 Lokasi	- Operasi Pasar Murah Kepokmas APBD Kab.Karawang di 2 Kecamatan - Operasi Pasar Murah Kepokmas APBD Provinsi di 1 Kecamatan	- Operasi Pasar Murah Kepokmas APBD Kab. Karawang Kecamatan - Operasi Pasar Murah Kepokmas APBD Provinsi di 1 Kecamatan	Disperindag, Disperindag,
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemantauan Harga Bapokting 8 Pasar	Pelaksanaan Pemantauan Harga Bapokting 8 Pasar	Pelaksanaan Pemantauan Harga Bapokting 8 Pasar	Disperindag,
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Melaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah 60 Kali (pada 30 Kecamatan)	Melaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah 65 Kali (pada 30 Kecamatan)	Melaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah 70 Kali (pada 30 Kecamatan)	DPKP
Ketersediaan Pasokan (Meningkatkan dan Pengembangan Produksi Bahan Pangan Pokok, Hewan Unggas, Daging dan Produk Perikanan)	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan penjaminan SDG Hewan/Tanamam	a. Penyaluran Benih Holtikutura dan Tanamah Buah-buahan 4 Komoditas b. Pelatihan Okulasi 1 kali c. Pemanfaatan lahan saluran citarum dengan komoditas buah-buahan d. Demplot Padi organik 25 Ha e. Demplot Kedelai, Demplot Porang, Ketahanan Pangan f. Pengembalikan Kesuburan Tanah 750 Ha	a. Penyaluran Benih Holtikutura dan Tanamah Buah-buahan 4 Komoditas b. Pelatihan Okulasi 1 kali c. Pemanfaatan lahan saluran citarum dengan komoditas buah-buahan d. Demplot Padi organik 25 Ha e. Demplot Kedelai, Demplot Porang, Ketahanan Pangan f. Pengembalikan Kesuburan Tanah 800 Ha	a. Penyaluran Benih Holtikutura dan Tanamah Buah-buahan 4 Komoditas b. Pelatihan Okulasi 1 kali c. Pemanfaatan lahan saluran citarum dengan komoditas buah-buahan d. Demplot Padi organik 25 Ha e. Demplot Kedelai, Demplot Porang, Ketahanan Pangan f. Pengembalikan Kesuburan Tanah 1.000 Ha	DPKP
		Penyediaan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Pembinaan kepada Lembaga distribusi pangan masyarakat	a. Pembinaan kepada Lembaga distribusi pangan masyarakat b. Fasilitasi sarana Lumbung Pangan Masyarakat c. Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD)	a. Pembinaan kepada Lembaga distribusi pangan masyarakat b. Fasilitasi sarana Lumbung Pangan Masyarakat c. Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD)	DPKP

	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jaringan Irigasi Tani, Pintu Air	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian JUT, JIT, Pintu Air	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian JUT, JIT, Pintu Air	DPKP
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Memastikan Lalu Lintas Ternak / produk hasil ternak	Memastikan Lalu Lintas Ternak / produk hasil ternak	DPKP
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Melaksanakan Pengobatan dan Vaksinasi ternak	Melaksanakan Pengobatan dan Vaksinasi ternak	DPKP
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Operasional Rumah Potong Hewan	Operasional Rumah Potong Hewan	DPKP
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Melaksanakan Inseminasi Buatan	Melaksanakan Inseminasi Buatan	DPKP
		Kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah kabupaten/kota	Pelestarian dan Pemanfaatan wilayah sumber Bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Pengadaan Sarana Pendukung Peternakan	Pengadaan Sarana Pendukung Peternakan	DPKP
	Program Pengelolaan dan Pemawasan Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Produksi Tangkapan Laut	Peningkatan Produksi Tangkapan Laut	Dinas Perikanan
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan Air lainnya	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	a. Meningkatkan Produksi hasil tangkapan ikan PUD b. Mensosialisasikan ramah lingkungan c. Merangsang masyarakat melakukan usaha penangkapan dengan lebih	a. Meningkatkan Produksi hasil tangkapan ikan PUD b. Mensosialisasikan penangkapan ramah lingkungan c. Merangsang masyarakat melakukan usaha penangkapan dengan	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan untuk Pokdakan (Seperti mesin pompa tambak, mesin pompa air tawar (alkon), kolam bulat (bundar), kolam terpal kotak, mesin cetak pakan (pelet)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan untuk Pokdakan (Seperti mesin pompa tambak, mesin pompa air tawar (alkon), kolam bulat (bundar), kolam terpal kotak, mesin cetak pakan	Dinas Perikanan

Program Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Pengembangan Usaha Mikro	a. Melaksanakan kegiatan Fasilitas Perijinan b. Pelatihan c. Pendampingan d. Fasilitas bantuan Kemas e. Pemasaran Produk UMKM	a. Melaksanakan kegiatan Fasilitas Perijinan b. Pelatihan c. Pendampingan d. Fasilitas bantuan Kemas e. Pemasaran Produk UMKM	a. Melaksanakan kegiatan Fasilitas Perijinan b. Pelatihan c. Pendampingan d. Fasilitas bantuan Kemas e. Pemasaran Produk UMKM	Dinkop UKM
Kelancaran Distribusi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pengadaan Lahan Pasar Cibuaya b. Pengaspalan Jalan Pawar Wadas c. Pembelian Tabung Pemadam Kebakaran untuk Pasar Penda	a. Melaksanakan kegiatan Fasilitas Perijinan b. Pelatihan c. Pendampingan d. Fasilitas bantuan Kemas e. Pemasaran Produk UMKM	a. Melaksanakan kegiatan Fasilitas Perijinan b. Pelatihan c. Pendampingan d. Fasilitas bantuan Kemas e. Pemasaran Produk UMKM	Disperindag
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/kota	Meningkatkan infrastruktur Transportasi	Meningkatkan infrastruktur Transportasi	Meningkatkan infrastruktur Transportasi	Dishub
	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Melaksanakan Penggantian Jembatan	Melaksanakan Penggantian Jembatan	Melaksanakan Penggantian Jembatan	DPUPR
		Pembangunan Jalan	Melaksanakan Pembangunan Jalan	Melaksanakan Pembangunan Jalan	Melaksanakan Pembangunan Jalan	DPUPR
		Rekonstruksi Jalan	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan	DPUPR
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Melaksanakan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Melaksanakan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Melaksanakan Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jembatan	DPUPR
		Rehabilitasi Jembatan	Melaksanakan Rehabilitasi Jembatan	Melaksanakan Rehabilitasi Jembatan	Melaksanakan Rehabilitasi Jembatan	DPUPR
		Pembangunan Jembatan	Melaksanakan Pembangunan Jembatan	Melaksanakan Pembangunan Jembatan	Melaksanakan Pembangunan Jembatan	DPUPR
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan	DPUPR
Koordinasi dan Komunikasi yang efektif	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	a. Rapat Koordinasi TPMD b. Capacity Building c. Hig Level Meeting	a. Rapat Koordinasi TPMD b. Capacity Building c. Hig Level Meeting	a. Rapat Koordinasi TPMD b. Capacity Building c. Hig Level Meeting	Bagian PSDA
	Program Penyediaan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin ketersediaan Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	a. Optimalisasi Aplikasi Panel harga b. Penyajian data harga pangan di SILINDA JABAR (sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat)	a. Optimalisasi Aplikasi Panel harga b. Penyajian data harga pangan di SILINDA JABAR (sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat)	a. Optimalisasi Aplikasi Panel harga b. Penyajian data harga pangan di SILINDA JABAR (sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat)	Disperindag
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Informasi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen	a. Melakukan kegiatan pemantauan dan analisis akses pangan b. Melakukan input data harga pangan ke Aplikasi SILINDA JABAR	a. Melakukan kegiatan pemantauan dan analisis akses pangan b. Melakukan input data harga pangan ke Aplikasi SILINDA JABAR	a. Melakukan kegiatan pemantauan dan analisis akses pangan b. Melakukan input data harga pangan ke Aplikasi SILINDA JABAR	DPKP

Program Pemeliharaan Sub Domain Aplikasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Penyediaan Informasi dan Publikasi	Publikasi informasi harga pangan dan Barang Penting	Publikasi informasi harga pangan dan Barang Penting	Publikasi informasi harga pangan dan Barang Penting	Diskominfo
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Melaksanakan Monitoring ke lapangan dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah	Monitoring ke lapangan dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah	Monitoring ke lapangan dan Pembinaan kepada Perangkat Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan ketertarikan dan ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menyelenggarakan koordinasi kerjasama dalam hal ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat dengan komponen masyarakat yang peduli dan kompeten	Melaksanakan koordinasi kerjasama dalam hal ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat dengan komponen masyarakat	Melaksanakan koordinasi kerjasama dalam hal ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat dengan komponen masyarakat	Satpol PP
	Pencegakan peraturan daerah Kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	Melakukan pendampingan Pengawasan tidak harga di Pasar	Melakukan pendampingan Pengawasan tidak harga di Pasar	Satpol PP
Peningkatan Kerjasama daerah dalam pengendalian Inflasi	Pelaksanaan kerjasama daerah	Melakukan hubungan kerjasama	Melakukan kerjasama dengan Kabupaten Bandung	Melakukan Kerjasama dengan instansi terkait	Bagian Kerjasama Setda

